

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI
ISLAMIC SOCIAL REPORTING
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG
TERDAPAT PADA DAFTAR EFEK SYARIAH
TAHUN 2009 – 2011**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

SEPTI WIDIAWATI
NIM. C2C008225

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Septi Widiawati
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008225
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI *ISLAMIC SOCIAL*
REPORTING PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
YANG TERDAPAT PADA DAFTAR EFEK
SYARIAH TAHUN 2009-2011**

Dosen Pembimbing : Surya Raharja, S.E., MSi., Akt.

Semarang, 15 Agustus 2012

Dosen Pembimbing

(Surya Raharja, S.E., MSi., Akt.)

NIP. 197605252006041002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Septi Widiawati
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008225
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI *ISLAMIC SOCIAL*
REPORTING PERUSAHAAN - PERUSAHAAN
YANG TERDAPAT PADA DAFTAR EFEK
SYARIAH TAHUN 2009-2011**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 7 September 2012

Tim Penguji :

1. Surya Raharja, S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Faisal, S.E., M.Si., Akt. (.....)
3. Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Septi Widiawati menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Islamic Social Reporting* Perusahaan-Perusahaan Yang Terdapat Pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009-2011 adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak dapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lainseolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 15 Agustus 2012

Yang membuat pernyataan,

(Septi Widiawati)

NIM. C2C008225

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah (DES) tahun 2009-2011 untuk mengungkapkan *Islamic Social Reporting*. DES merupakan kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang telah disetujui oleh Bapepam-LK. DES berguna sebagai petunjuk bagi para investor Muslim yang ingin menginvestasikan dananya pada efek – efek syariah. Karakteristik perusahaan yang menjadi variabel untuk diuji terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri, dan jenis bank. Berdasarkan indeks ISR dapat dilihat seberapa besar peranan perusahaan dalam mengungkapkan pertanggungjawaban sosial islaminya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan tiap perusahaan yang diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia dan hipotesis diuji menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Kata Kunci : *Islamic Social Reporting*, ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri, jenis bank, indeks ISR, Daftar Efek Syariah.

ABSTRACT

The study aims to analyze the factors that may influence the companies that performed among List of Sharia Securities (Daftar Efek Syariah - DES) for years 2009-2011 to provide Islamic social reporting disclosure. DES are collection of securities that are not contradict with Islamic principles and have been approved by Bapepam-Lk. DES are guide for Islamic mutual fund to put their funds and for Muslim investor to invest in Islamic securities. The factors are company's characteristic that consists of firm size, profitability, industry type and classification of banks. In accordance to ISR index was knew how great the role of the company in conducting islamic social disclosure. The annual reports as data which can be obtained in Indonesian Stock Exchange and hypothesis testing using multiple liniear regression. The result of study examined that all factors have a significant to ISR disclosure.

Key Words: *Islamic Social Reporting, company's characteristic, ISR Index, List of Sharia Securities.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji hanya milik Allah Subhaanahu wa Ta'ala, Raja semesta alam. Semoga Ia senantiasa memberikan kekuatan dan kesabaran kepada penulis sehingga diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menulis serta menyelesaikan skripsi dengan judul “*ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ISLAMIC SOCIAL REPORTING PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERDAPAT PADA DAFTAR EFEK SYARIAH TAHUN 2009-2011*”. Salam dan sejahtera selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Semoga keselamatan juga terlimpah kepada keluarganya, para sahabat, alim ulama serta seluruh umat yang tak pernah berhenti dicintainya.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini :

1. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Drs. H. Mohamad Nasir, MSi., Ph.D., Akt.
2. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Prof. Dr. H. M. Syafrudin, MSi., Akt.
3. Bapak Herry Laksito, SE., M.Adv. Acc., Akt selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bantuan dan saran kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Bapak Surya Raharja, S.E., MSi., Akt. selaku dosen pembimbing yang

selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta petunjuk kepada penulis.

5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas ilmu dan bantuannya selama penulis menempuh kuliah di Universitas Diponegoro.
6. Bapak dan ibukku tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi selama penulisan skripsi ini, love you mom and dad.
7. Kakak dan Adikku yang imut, yang sewaktu-waktu membuat jengkel dan marah pada penulis saat menyelesaikan skripsi. Penulis menyadari bahwa kalian hendak memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan kuliah meski dengan cara yang beda.
8. Sahabat SMA yang selalu memberikan doa, motivasi, dan bantuannya walaupun berbeda tempat dan mempunyai kesibukan masing-masing, Rezki Ayu Lestari dan Lusi Dwi Rianti, jazakillaahu khayran katsiraa.
9. Lala, Mitha, Tani, dan Tiar yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini serta bantuan imaterial lain, doa, dan motivasinya.
10. Teman-teman ekstensi regular 2 angkatan 2008 jurusan akuntansi, terima kasih atas kerjasama dan bantuannya selama ini. Semoga kalian sukses selalu dan mendapat lindungan-Nya
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati semoga Allah Subhanaahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih

jauh dari sempurna dan membutuhkan banyak perbaikan dan pengembangan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat digunakan dalam penyempurnaan penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 15 Agustus 2012

Penulis

Septi Widiawati

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

***sebagai motivasi dan pengingat diriku juga dirimu...**

Jika engkau duduk bersama orang bodoh, maka diamlah. Jika engkau duduk bersama ulama maka diamlah. Sesungguhnya diammu di hadapan orang bodoh akan menambah kebijaksanaanmu dan diammu di hadapan ulama akan menambah ilmunmu.

{*Hasan al Bashri*}

Ilmu itu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya benar yaitu untuk menghilangkan kebodohan dari dalam diri dan orang lain....

{*Imam Ahmad dalam Kitabul Ilmi, 29*}

Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu. Dan janganlah engkau kagum dengan amalan-amalanmu, sesungguhnya engkau tidak tahu apakah engkau termasuk orang yang celaka (masuk neraka) atau orang yang bahagia (masuk surga)

{*Diriwayatkan oleh Al Baihaqi*}

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk

1. Kedua orang tuaku tercinta
2. Saudara-saudaraku tersayang
3. Sahabat dan teman-temanku
4. Almamater

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	11

2.1.1	Teori Legitimasi	11
2.1.2	Teori Stakeholders.....	13
2.2	Pengungkapan (<i>Disclosure</i>)	15
2.2.1	Definisi	15
2.2.2	Corporate Social Responsibility (CSR).....	20
2.2.3	Daftar Efek Syariah	24
2.2.4	<i>Islamic Social Reporting</i>	28
2.3	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR).....	37
2.3.1	Ukuran Perusahaan.....	37
2.3.2	Profitabilitas	40
2.3.3	Tipe Industri	41
2.3.4	Jenis Bank.....	42
2.4	Penelitian Terdahulu	44
2.5	Kerangka Pemikiran.....	48
2.6	Hipotesis.....	48
2.6.1	Ukuran Perusahaan dan <i>Islamic Social Reporting</i>	49
2.6.2	Profitabilitas dan <i>Islamic Social Reporting</i>	49
2.6.3	Tipe Industri dan <i>Islamic Social Reporting</i>	50
2.6.4	Jenis Bank dan <i>Islamic Social Reporting</i>	51

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	52
3.1.1	Variabel Bebas (Independen)	52
3.1.2	Variabel Terikat (Dependen).....	54

3.2.	Populasi dan Sampel	56
3.3.	Jenis dan Sumber Data	57
3.4.	Metode Pengumpulan Data	57
3.5.	Metode Analisis.....	58
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	58
3.5.2	Uji Normalitas	58
3.5.3	Uji Asumsi Klasik	59
3.6	Pengujian Hipotesis.....	61
3.6.1	Koefisien Determinasi.....	62
3.6.2	Uji F.....	62
3.6.3	Uji t.....	63

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Analisis Hasil Penelitian	65
4.2	Analisis Statistik Deskriptif	77
4.3	Uji Normalitas Data	82
4.4	Analisis Residual.....	84
4.5	Uji Asumsi Klasik	84
4.5.1	Uji Multikolinearitas	84
4.5.2	Uji Autokorelasi	85
4.5.3	Uji Heterokedastisitas.....	87
4.6	Analisis Regresi Berganda	89
4.6.1	Koefisien Determinasi (R^2).....	89
4.6.2	Uji F.....	89
4.6.3	Uji t.....	90

BAB V PENUTUP

5.1	Simpulan.....	96
5.2	Keterbatasan Penelitian	97
5.3	Saran.....	97
	DAFTAR PUSTAKA	99
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Penelitian Terdahulu	45
Tabel 3.1	Klasifikasi Tipe Industri Berdasarkan BEI.....	53
Tabel 3.2	Proses Pengambilan Sampel.....	56
Tabel 4.1	Pengungkapan Indeks ISR Tahun 2009-2011 Menurut Tema	67
Tabel 4.2	Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian.....	77
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif Proporsi Variabel <i>Dummy</i>	78
Tabel 4.4	Statistik Deskriptif Variabel ISR.....	79
Tabel 4.5	Statistik Deskriptif Variabel Ukuran Perusahaan.....	80
Tabel 4.6	Statistik Deskriptif Variabel Profitabilitas	81
Tabel 4.7	Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	82
Tabel 4.8	Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Setelah Oulier Dikeluarkan	83
Tabel 4.9	Hasil Uji Multikolinearitas	85
Tabel 4.10	Hasil Uji Autokorelasi.....	86
Tabel 4.11	Hasil Uji Heterokedastisitas	87
Tabel 4.12	Hasil Uji Penghilangan Heterokedastisitas	88
Tabel 4.13	Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi	89
Tabel 4.14	Hasil Uji F	89
Tabel 4.15	Hasil Regresi Berganda	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tingkatan Tanggung Jawab Perusahaan	23
Gambar 2.2	Kerangka Syariah	29
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran	48
Gambar 4.1	Total Pengungkapan Indeks ISR	65
Gambar 4.2	Grafik Histrogram Uji Normalitas.....	84
Gambar 4.3	Grafik Scatterplot Uji Heterokedastisitas	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (*Corporate Social Reporting*) kian menjadi sorotan penting dalam beberapa dekade terakhir karena konsep CSR merupakan inti dari etika bisnis bagi tiap perusahaan. Pengungkapan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan pun telah banyak dilakukan penelitian di berbagai negara berkembang maupun negara maju. Di Indonesia, konsep CSR sudah mulai berkembang ke arah yang lebih positif. Beberapa tahun terakhir, berbagai perusahaan sudah mulai menunjukkan komitmennya untuk menerapkan praktik tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan mereka.

Utama (2007) mengungkapkan bahwa praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia mulai berkembang seiring dengan semakin meningkatnya perhatian masyarakat global terhadap perkembangan perusahaan transnasional atau multinasional yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, pengungkapan CSR juga terkait dengan isu kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia seperti penggundulan hutan, polusi udara, pencemaran air bersih, perubahan iklim, dan sebagainya. Waryanto (2010) memaparkan bahwa perkembangan praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia juga mendapat dukungan dari pemerintah. Hal

itu, terlihat dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 oleh pemerintah terkait dengan kewajiban perusahaan yang menjalankan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Gagasan utama dalam isu CSR ini adalah menjadikan perusahaan dihadapkan bukan hanya pada konsep *single-bottom-line* (SBL) dalam bentuk nilai perusahaan atau catatan keuangan perusahaan, melainkan juga pada konsep *triple-bottom-line* (TBL) yang meliputi aspek keuangan perusahaan, kehidupan sosial dan lingkungan hidup. Sinergi tiga elemen (*triple-bottom-line*) ini merupakan kunci dari konsep pembangunan yang berkelanjutan. Konsep SBL dianggap sebagai konsep yang sudah ketinggalan zaman. Konsep ini menekankan hanya pada pencapaian *profit* yang maksimal pada laporan laba rugi perusahaan. Friedman (1982) mengemukakan bahwa keberlanjutan perusahaan bukan hanya bergantung pada laba perusahaan (*profit*) melainkan juga bergantung pada tindakan nyata terhadap karyawan di dalam perusahaan dan masyarakat di luar perusahaan (*people*) serta lingkungan (*planet*). Perusahaan dianggap tidak hanya memiliki kewajiban ekonomi dan hukum kepada pemegang saham (*shareholder*), tetapi juga memiliki kewajiban sosial kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Jangkauan tanggung jawab sosial kepada para pemangku kepentingan dinilai lebih luas dibandingkan tanggung jawab ekonomi dan hukum kepada pemegang saham. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemangku kepentingan melibatkan beberapa pihak yaitu pelanggan, karyawan, investor, pemasok, kreditor, masyarakat, pemerintah, dan kompetitor.

Konsep CSR kini tidak hanya berkembang di ekonomi konvensional, tetapi juga berkembang dalam ekonomi Islam. Konsep CSR dalam Islam erat kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan konsep syariah yang diharapkan perusahaan tersebut dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan secara Islami. Siwar dan Hossain (2009) memaparkan bahwa nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam dapat digunakan sebagai landasan tanggung jawab sosial perusahaan sama seperti halnya pada perusahaan konvensional. Konsep ini dalam Islam lebih menekankan bentuk ketaqwaan umat manusia kepada Allah Subhanallahu wa Ta'ala dalam dimensi perusahaan. Dalam penelitiannya, mereka menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki hubungan yang relevan dan memiliki kontribusi terhadap konsep CSR yang telah berkembang hingga saat ini.

Berkembangnya CSR dalam ekonomi Islam juga turut meningkatkan perhatian masyarakat terhadap lembaga atau institusi syariah. Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat untuk mengenal secara lebih dalam terhadap lembaga atau institusi syariah, semakin besar dari waktu ke waktu. Pasar modal sebagai lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek dalam hal ini adalah pasar modal syariah berperan penting dalam meningkatkan pangsa pasar efek-efek syariah pada perusahaan-perusahaan ingin berpartisipasi dalam pasar modal syariah di Indonesia.

Pasar modal syariah di Indonesia identik dengan *Jakarta Islamic Index* (JII) yang hanya terdiri dari 30 saham syariah yang tercatat di Bursa Efek

Indonesia (BEI). Namun, Efek Syariah yang terdapat di pasar modal syariah di Indonesia tidak hanya berjumlah 30 saham syariah yang menjadi konstituen JII saja melainkan terdiri dari berbagai macam jenis efek. Hal tersebut semakin terlihat jelas setelah Bapepam-LK mengeluarkan Daftar Efek Syariah (DES) pada November 2007 yang kemudian menjadikan DES sebagai satu-satunya rujukan mengenai Efek Syariah yang ada di Indonesia (dalam situs BEI mengenai syariah).

Othman dan Thani (2010) memaparkan bahwa perkembangan pasar modal syariah yang begitu cepat membuat perusahaan-perusahaan yang masuk pada Daftar Efek Syariah diekspektasikan untuk menyajikan suatu dimensi religi dalam pengungkapan laporan tahunan yang bertujuan untuk memberi manfaat bagi pemangku kepentingan muslim. Oleh karena itu, dibutuhkan acuan (*guideline*) untuk mengukur sejauh mana perusahaan-perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah membuat laporan tanggung jawab sosial yang turut menyajikan aspek-aspek religi dalam laporan tahunan dengan menyajikan pemenuhan kewajiban perusahaan yang sesuai dengan syariah.

Othman *et al.* (2009) mengembangkan indeks pengungkapan yang relevan dengan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya pada *Islamic Social Reporting (ISR) Index*. ISR pertama kali dikemukakan oleh Haniffa (2002) lalu dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Othman *et al.* (2009) di Malaysia. Haniffa (2002) mengungkapkan bahwa adanya keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual *Islamic Social Reporting* berdasarkan ketentuan syariah yang tidak hanya membantu

pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap Allah Subhanaahu wa Ta'ala dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Othman *et al.* (2009) menentukan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan direksi muslim secara signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR, sedangkan tipe industri bukanlah faktor penting yang mempengaruhi ISR secara signifikan. Penelitian terdahulu lainnya juga pernah dilakukan oleh Raditya (2012) yang memasukkan variabel bebas spesifik syariah yaitu penerbitan sukuk dan umur perusahaan yang dianggap dapat mempengaruhi pengungkapan ISR. Hasil penelitian yang dilakukan selama kurun waktu tahun 2009-2010 membuktikan bahwa penerbitan sukuk, jenis industri dan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR, sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan ISR.

Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Raditya (2012) dan Othman *et al.* (2009) dengan menggunakan ISR sebagai indeks pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap perusahaan-perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah disertai dengan perubahan pada item ISR dan variabel bebas yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, yaitu mengganti variabel bebas Dewan Direksi Muslim dengan variabel bebas jenis bank yang dipergunakan oleh perusahaan. Hal tersebut dikarenakan, data untuk mengetahui apakah Dewan Direksi beragama Islam atau

bukan, tidak dipublikasikan secara umum oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia karena bersifat privasi bagi Dewan Direksi maupun perusahaan, namun pengungkapan mengenai variabel Dewan Direksi Muslim di Malaysia wajib diungkapkan oleh tiap perusahaan karena berkaitan dengan besarnya zakat yang akan ditanggung oleh tiap perusahaan.

Peneliti melakukan perubahan item ISR pada penelitian Othman *et al.* (2009) dengan mengurangi jumlah item pada indeks ISR menjadi 38 item dengan 5 tema mengikuti tema indeks ISR pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian Haniffa (2002). Penelitian mengenai ISR ini masih sangat jarang ditemui, karena penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan *Global Reporting Initiatives* (GRI) sebagai *guideline* untuk *sustainability reporting* pada perusahaan-perusahaan publik serta sebagian besar penelitian terdahulu berkaitan dengan pengungkapan CSR perusahaan berdasarkan ketentuan syariah yang hanya spesifik terhadap bank syariah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Islamic Social Reporting* Perusahaan – Perusahaan Yang Terdapat Pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009– 2011”**

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perusahaan-perusahaan pada Daftar Efek Syariah, maka berdasarkan latar

belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah?
3. Apakah tipe industri berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah?
4. Apakah jenis bank berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah 2009-2011.
2. Mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah 2009-2011.
3. Mengetahui apakah tipe industri berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah 2009-2011.
4. Mengetahui apakah jenis bank berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah 2009-2011.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Universitas dan rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang memilih konsentrasi akuntansi, dapat memperoleh tambahan pengetahuan dan referensi mengenai faktor yang mempengaruhi perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah untuk mengungkapkan *Islamic Social Report*.
2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru kepada investor dalam menilai kinerja perusahaan sehingga dapat dijadikan alat untuk pengambilan keputusan investasi dengan memilih saham perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah.
3. Bagi perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa lebih meningkatkan kinerja perusahaan lagi, sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab sosial di luar perusahaan.
4. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat membeikan manfaat untuk lebih memahami bagaimana cara menganalisis dan memecahkan masalah – masalah yang nyata melalui teori yang didapatkan dalam kuliah mengenai pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini adalah *Islamic Social Reporting*.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian, mencakup variabel penelitian dan definisi operasional variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Legitimasi merupakan hal yang penting bagi organisasi terhadap batasan-batasan berupa norma-norma dan nilai-nilai sosial serta reaksinya sehingga mendorong organisasi agar berperilaku dengan memperhatikan nilai-nilai sosial di lingkungan perusahaan. Teori legitimasi mengandung pengertian bahwa aktivitas berupa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu usaha yang berkenaan dengan tekanan dari lingkungan sekitar, misalnya tekanan politik, sosial ataupun ekonomi. Teori legitimasi didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat (Ahmad dan Sulaiman, 2004). Teori tersebut diperlukan oleh institusi-institusi untuk mencapai tujuan agar sejalan dengan masyarakat luas. Gray *et al.*, 1995 (dalam Ahmad dan Sulaiman, 2004) dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri.

Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung

jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, salah satu faktor yang banyak dibahas oleh peneliti mengenai motivasi manajer untuk melakukan pengungkapan sosial lingkungan adalah untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat khususnya atas kelangsungan organisasi. Pandangan ini dicakup dalam teori legitimasi. Menurut Gray *et al.*, 1995 (dalam Kirana, 2009 hal. 50):

a systems-oriented view of organization and society permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship(s) between organization, the State, individuals and groups

Dalam perspektif orientasi sistem suatu entitas dipengaruhi dan sebaliknya mempengaruhi komunitas dimana entitas itu melakukan kegiatannya. Kebijakan pengungkapan perusahaan dipandang sebagai suatu hal penting dimana manajer dapat mempengaruhi persepsi pihak lain atas organisasi tersebut. Teori legitimasi telah menjadi salah satu teori yang paling sering digunakan terutama ketika berkaitan dengan wilayah sosial dan akuntansi lingkungan. Meskipun masih terdapat pesimisme yang kuat yang dikemukakan oleh banyak peneliti, teori ini telah menawarkan sudut pandang yang nyata mengenai pengakuan sebuah perusahaan secara sukarela oleh masyarakat.

2.1.2 Teori Stakeholders

Pengungkapan sosial mulai menjadi bahan pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Investor perlu mengetahui tanggung jawab sosial perusahaan guna menghindari dampak yang timbul dikemudian hari sebagai akibat kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Teori *stakeholders* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para *stakeholdersnya* (pemegang saham, kreditur, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Gray, Kouhy dan Adams (1994) dalam Chariri (2008, hal. 159) menyatakan:

kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada stakeholder, dan dukungan tersebut harus dicari, sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin *powerfull stakeholder*, semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai media komunikasi antara perusahaan dengan stakeholdernya.

Wibisono, 2007 (dalam Kirana, 2009) mengartikan *stakeholders* sebagai pemangku kepentingan yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh perusahaan. Definisi lain dilontarkan oleh Rhenald Kasali sebagaimana dikutip oleh Wibisono, 2007 (dalam Kirana, 2009) yang menyatakan bahwa yang dimaksud para pihak adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan

perusahaan. Dalam hal ini Rhenald Kasali membagi *stakeholders* menjadi sebagai berikut :

a. *Stakeholders internal* dan *stakeholders eksternal*

Stakeholders internal adalah *stakeholders* yang berada di dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer, dan pemegang saham (shareholder), sedangkan *stakeholders eksternal* adalah *stakeholders* yang berada di luar lingkungan organisasi seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, dan sebagainya.

b. *Stakeholders primer*, *stakeholders sekunder* dan *stakeholders marjinal*

Dalam hal ini *stakeholders* yang paling penting disebut *stakeholders primer* dan *stakeholders* yang kurang mampu disebut *stakeholders sekunder*, sedangkan yang biasa diabaikan disebut *stakeholders marjinal*. Urutan prioritas ini bagi setiap perusahaan berbeda-beda, meskipun produk atau jasanya sama dan bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu.

c. *Stakeholders tradisional* dan *stakeholders masa depan*

Karyawan dan konsumen dapat disebut sebagai *stakeholders tradisional*. Karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi, sedangkan *stakeholders masa depan* adalah *stakeholders* pada masa

yang akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti, dan konsumen potensial.

- d. *Proponents, opponents*, dan *uncommitted* (pendukung, penentang, dan yang tidak peduli)

Di antara *stakeholders* ada kelompok yang memihak organisasi (*proponents*), menentang organisasi (*opponents*) dan yang tidak peduli atau abai (*uncommitted*). Dalam hal ini, organisasi perlu untuk mengenal *stakeholders* yang berbeda-beda ini, agar dengan jernih dapat melihat permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proporsional.

- e. *Silent majority* dan *vocal minority* (pasif dan aktif)

Dilihat dari aktivitas *stakeholders* dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan penentangan atau dukungannya secara vocal (aktif) namun ada pula yang menyatakan secara silent (pasif).

2.2 Pengungkapan (*Disclosure*)

2.2.1 Definisi

Pengungkapan secara sadar-hana dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Sedangkan Noegraheni (2005) menyatakan bahwa bagi pihak di luar manajemen, laporan keuangan merupakan jendela informasi yang memungkinkan mereka melihat kondisi perusahaan

tersebut. Luasnya informasi yang dapat diperoleh akan sangat tergantung pada tingkat pengungkapan dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Amurwani (2006) memaparkan bahwa pengungkapan dapat dikaitkan dengan dua aspek, yakni data dan laporan keuangan. Apabila dikaitkan dengan data, pengungkapan mengandung arti bahwa data harus memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Sedangkan apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan secara tepat kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut.

Istilah pengungkapan dalam akuntansi mengacu pada penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Penyajian dan pengungkapan merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Evans (2003) membatasi definisi pengungkapan pada hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pengungkapan memiliki arti menyediakan informasi dalam laporan keuangan yang meliputi laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pengungkapan erat kaitannya dengan empat pertanyaan (Evans, 2003) berikut: (1) untuk siapa informasi diungkapkan, (2) mengapa pengungkapan perlu untuk dibuat, (3) berapa banyak informasi yang harus diungkapkan, (4) kapan informasi harus diungkapkan. Keempat pertanyaan tersebut harus dijawab oleh perusahaan yang akan melakukan pengungkapan untuk mengetahui siapa pihak-pihak yang

akan menggunakan informasi, tujuan dan alasan dilakukannya pengungkapan, banyaknya pengungkapan yang diungkap, dan waktu yang tepat untuk melakukan pengungkapan. Selain itu Hendriksen (2001) juga memberikan tiga konsep yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan (disclosure) yaitu: (1) untuk siapa informasi diungkapkan, (2) apa tujuan informasi tersebut, (3) berapa banyak informasi yang diungkapkan (Hendriksen, 2001). Menurutnya berapa banyak informasi yang harus diungkapkan tidak hanya tergantung pada keahlian pembaca, namun juga tergantung pada standar yang dianggap cukup.

Secara umum konsep pengungkapan (Hendriksen, 2001 dan Evans, 2003) terkait dengan jawaban atas pertanyaan pengungkapan berapa banyak informasi yang harus diungkapkan. Konsep tersebut antara lain:

1. Pengungkapan Cukup (Adequate Disclosure)

Pengungkapan cukup adalah pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar laporan keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan.

2. Pengungkapan Wajar (Fair Disclosure)

Pengungkapan wajar adalah pengungkapan yang harus dicapai agar semua pihak mendapatkan informasi yang sama.

3. Pengungkapan Penuh (Full Disclosure)

Pengungkapan ini menuntut atas penyajian dan pengungkapan secara penuh atas seluruh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan.

Ada dua macam tipe pengungkapan dalam laporan keuangan (*financial report*) dan laporan tahunan (*annual report*).

1. Pengungkapan Wajib (*mandatory disclosure*)

adalah pengungkapan bagian-bagian dalam laporan keuangan yang diwajibkan oleh Bapepam dan LK melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-38/PM/1996 kemudian direvisi dalam Peraturan Bapepam No. KEP-134/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006 dan Ikatan Akuntansi Indonesia.

2. Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*)

adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan publik sebagaimana tambahan pengungkapan minimum yang telah ditetapkan. Pengungkapan sukarela yang termasuk dalam kategori ini adalah pengungkapan tambahan terkait informasi keuangan perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan; kedua pengungkapan sukarela perusahaan ini seringkali diungkapkan dalam bentuk laporan tahunan (*annual report*) walaupun sekarang ini cukup banyak perusahaan yang menerbitkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang terpisah dari laporan tahunan (*annual report*) dalam bentuk laporan keberlanjutan (*sustainability report*)

Informasi keuangan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial di perusahaan kiranya harus diberi pengungkapan secara memadai selain pengungkapan minimum yang diwajibkan agar dapat dipahami oleh para pengguna. Oleh karena itu dalam upaya menarik minat konsumen dan membentuk *public image* yang

optimal, perusahaan dituntut untuk memberikan pengungkapan yang minimal sama dengan pesaingnya atau bahkan melebihi pengungkapan yang pernah dibuat oleh perusahaan pesaing sebelumnya. Tuntutan tersebut datang dari semakin tingginya tekanan dan tingkat persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. Tekanan tersebut berasal dari dorongan untuk mengurangi resiko yang dihadapi oleh perusahaan dalam urusannya menampilkan diri sebagai perusahaan yang berkualitas. Kompetisi yang ketat tersebut menuntut adanya pengungkapan dan pertukaran informasi yang memadai.

Dari perspektif ekonomi, perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan (Verecchia, 1983 dalam Basalamah *et al.*, 2005). Sedangkan dalam ekonomi Islam, perusahaan akan menghasilkan pengungkapan yang benar, adil serta transparansi apabila memiliki suatu akuntabilitas, yakni akuntabilitas terhadap Allah Subhanaahu wa Ta'ala. Konsep dasar akuntabilitas Islam ini percaya bahwa seluruh sumber daya yang telah disediakan dan diciptakan adalah untuk kemaslahatan setiap manusia. Oleh karena itu, pengungkapan fakta keuangan harus berisi informasi yang benar, akurat, dan tersedia bebas untuk para pengguna laporan keuangan. Dalam melakukan penentuan indeks dilakukan dengan menggunakan *disclosure item* pada lampiran 1 yang digunakan untuk menentukan *disclosure* yang disajikan oleh perusahaan.

2.2.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting* (Mathews, 1995) atau *corporate social responsibility* (Hackston dan Milne, 1996) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (dalam Sembiring, 2005). Pengertian *Corporate Social Reporting* (CSR) menurut The World Business Council on Sustainable Development (WBCSD), lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara, di dalam situsnya adalah sebagai suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika keprilakuan (*behavioral ethnics*) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*). Komitmen lainnya adalah meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas local, serta masyarakat luas (dalam Effendi, 2009). Sedangkan menurut Daniri (2008) CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategi stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya.

Konsep CSR dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Konsep pertama menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah mencari laba, sehingga CSR merupakan sebuah strategi dalam operasi bisnis. Sedangkan konsep yang kedua menyatakan bahwa tujuan dari perusahaan adalah mencari laba (*profit*), mensejahterakan orang (*people*) dan menjamin keberlanjutan hidup tempat yang

ditinggali (*planet*). *Global Compact Initiative* (GCI) menyebut konsep ini dengan 3P, yaitu: *Profit* (effectivity, efficiency, flexibility and creativity), *People* (health, safety and welfare), dan *Planet* (environmental quality and disturbance) dimana gagasan tersebut menjadikan perusahaan tidak lagi hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Elkington (dalam Effendi, 2009) menyatakan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan 3P (profit, people, and people). Selain mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) serta turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, namun juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya (Wibowo, 2007). Daniri (2008) menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom line* yaitu selain aspek finansial juga aspek sosial dan lingkungan.

Pelaksanaan CSR di Indonesia merupakan suatu bentuk pelaporan sukarela bagi perusahaan mengingat perkembangan dan laju perekonomian bangsa Indonesia yang semakin pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang didirikan, baik perusahaan nasional yang modalnya dari negara, perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, perusahaan gabungan antara pihak swasta nasional dengan negara manapun, perusahaan patungan antara pihak asing dengan negara dalam bentuk perusahaan penanaman modal asing di

Indonesia. Dauman dan Hargreaves, 1992 (dalam Hasibuan, 2001 hal. 15-16) menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan dapat dibagi menjadi tiga level sebagai berikut:

1. *Basic Responsibility*

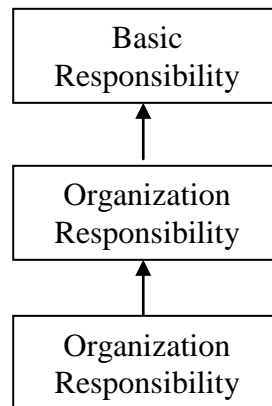
Pada level pertama, menghubungkan tanggung jawab yang pertama dari suatu perusahaan yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut seperti; perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memasukkan pemegang saham. Bila tanggung jawab pada level ini tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak yang sangat serius.

2. *Organization Responsibility*

Pada level kedua ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan *stakeholder* seperti pekerja, pemegang saham, dan masyarakat di sekitarnya. Contohnya: bertanggung jawab terhadap investor untuk memaksimalkan profit dan mensejahterakan karyawan.

3. *Societal Responses*

Pada level ketiga, menunjukkan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan. Contohnya: melakukan *recruitment* tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

Gambar 2.1**Tingkatan Tanggung Jawab Perusahaan**

Sumber: Dauman dan Hargreaves, 1992
(dalam Hasibuan, 2001 hal. 15-16)

Pelaporan CSR merupakan salah satu aspek penting dari akuntabilitas perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. Dewasa ini, pemahaman mengenai pelaporan CSR sudah lebih luas. Hal ini selaras dengan semakin berkembangnya akuntansi sosial sejak tahun 1970-an. Gray *et al.* (1987) mendefinisikan pelaporan CSR sebagai proses mengomunikasikan dampak sosial dan lingkungan akibat tindakan ekonomi suatu organisasi terhadap kelompok masyarakat tertentu dan masyarakat secara keseluruhan. Pelaporan CSR mencakup perluasan akuntabilitas suatu organisasi, tidak lagi hanya sekedar menyajikan akun-akun keuangan kepada pemegang saham. Perluasan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada hanya sekedar menghasilkan uang untuk pemegang saham. Menurut Gond dan Herrbach (2006), pelaporan CSR merupakan wujud proses monitor, eksplorasi, dan interpretasi dari

bentuk-bentuk akuntansi yang lebih luas seperti laporan sosial dan lingkungan. Pelaporan CSR memiliki akar fundamental yang sama dengan CSR dan dapat dihubungkan secara historis dengan praktik audit sosial.

2.2.3 Daftar Efek Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal berperan penting dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wadah investasi bagi masyarakat. Pasar modal lebih dikenal dengan sebutan Bursa Efek yang merupakan sistem terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung atau melalui wakilnya (Siamat, 2004).

Kini perkembangan pasar modal tidak hanya terjadi pada pasar modal konvensional, melainkan juga terjadi pada pasar modal syariah. Terminologi pasar modal syariah diartikan oleh Bapepam-LK sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penerapan prinsip dasar syariah di pasar modal bersumber dari Al Quran dan Hadist. Kegiatan di pasar modal syariah dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang berbentuk *muamalah*. Menurut kaidah fikih yang terdapat dalam Fatwa DSN No: 40/DSN-MUI/X/2003, hukum *muamalah* adalah *mubah* (boleh) kecuali ada dalil yang melarangnya. Kaidah fikih tersebut berbunyi “Pada dasarnya semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang

mengharamkannya.” Menurut Bapepam-LK konsep inilah yang menjadi prinsip dasar pasar modal syariah di Indonesia.

Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai sejak diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Pada 3 Juli 2000, Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment Management dalam meluncurkan *Jakarta Islamic Index* dengan tujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Pasar modal syariah merupakan tempat di mana efek syariah diperdagangkan. Efek-efek tersebut diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2007 Bapepam-LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan diikuti dengan peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali oleh Bapepam-LK pada tanggal 12 September 2007. Berikut efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah berdasarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.I mengenai Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah:

1. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia.
2. Efek yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.

3. Sukuk yang diterbitkan oleh emiten termasuk obligasi syariah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan peraturan ini.
4. Saham reksa dana syariah.
5. Unit penyertaan kontrak investasi kolektif reksa dana syariah.
6. Efek beragun aset syariah.
7. Efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan waran syariah, yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, sepanjang emiten atau perusahaan publik tersebut:
 - a. tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Peraturan Bapepam-LK nomor IX.A.13.
 - b. memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
 - 1). total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (delapan puluh dua persen).
 - 2). total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).
8. Efek syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan
9. Efek syariah lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Daftar Efek Syariah adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang ditetapkan oleh Bapepam-LK atau pihak yang disetujui Bapepam-LK. Daftar Efek Syariah (DES) tersebut merupakan panduan investasi bagi Reksa Dana Syariah dalam menempatkan dana kelolaannya serta juga dapat dipergunakan oleh investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio Efek Syariah. DES yang diterbitkan Bapepam-LK dapat dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu:

1. DES Periodik

DES Periodik merupakan DES yang diterbitkan secara berkala yaitu pada akhir Mei dan November setiap tahunnya. DES Periodik pertama kali diterbitkan Bapepam-LK tahun 2007.

2. DES Insidentil

DES Insidentil merupakan DES yang diterbitkan secara berkala. DES Insidentil diterbitkan antara lain yaitu:

- a. penetapan saham yang memenuhi kriteria efek syariah bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emitrn yang melakukan penawaran umum perdana atau pernyataan pendaftaran Perusahaan Publik.
- b. Penetapan saham Emiten dan atau Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria efek syariah berdasarkan laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada Bapepam-LK setelah Surat Keputusan DES secara periodik ditetapkan.

Selain itu, Penerbitan efek-efek dapat dilakukan dengan beberapa akad sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.14, antara lain akad ijarah, akad kafalah, akad mudharabah (qiradh), dan akad wakalah. Akad-akad inilah yang lazim digunakan dalam penerbitan efek syariah yang tergabung dalam Daftar Efek Syariah.

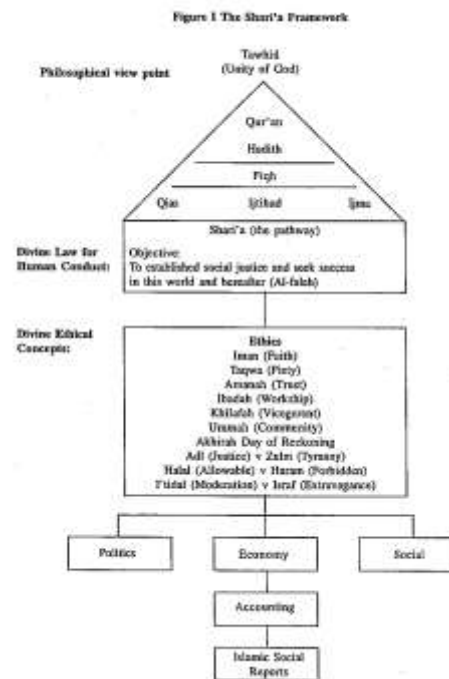
2.2.4 Islamic Social Reporting

Islam adalah agama yang secara lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi. Siwar dan Hossain (2009) menyatakan bahwa landasan dasar dari agama Islam adalah *aqidah* (belief and faith), *ibadah* (worship), dan *akhlaq* (morality and ethics). Selain itu, ada prinsip lain yang sangat mendasar bagi setiap Muslim yakni *tauhid* (mengesakan Allah Subhanallahu wa Ta'ala) dalam beribadah dan tidak menyekutukannya yang sesuai dengan firman Allah Subhanaahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 64 mengenai orang yang berhak menyandang gelar seorang Muslim:

Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali kepada Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.

Allah Subhanaahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk di muka bumi. Sebagai makhluk yang paling sempurna yang Allah Subhanaahu wa Ta'ala ciptakan sudah sepatutnya manusia selalu menjalani segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dimana yang berhubungan dengan hal ini adalah merusak lingkungan.

Gambar 2.2 Kerangka Syariah



Sumber : Haniffa (2002)

Berdasarkan kerangka syariah dapat dilihat bahwa tauhid merupakan landasan dasar dari ajaran Islam sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada kerangka tersebut juga menunjukkan konsep etika dalam Islam yang terdiri dari sepuluh konsep antara lain iman (faith), *taqwa* (piety), amanah (trust), ibadah (workship), *khilafah* (vicegerent), *ummah* (community), *akhirah day of reckoning*, *adl* (justice) dan *zulm* (tyranny), halal (allowable) dan haram (forbidden), serta *I'tidal* (moderation) dan *israf* (extravagance).

Menurut konsep etika dalam Islam tersebut terbentuk akuntabilitas dalam perspektif ekonomi Islam yaitu pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam ekonomi konvensional, pelaporan tanggung jawab sosial dikenal sebagai perpanjangan dari sistem pelaporan keuangan yang

merefleksikan ekspektasi sosial yang lebih luas sehubungan dengan peran masyarakat dalam ekonomi atau kegiatan bisnis perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, Haniffa (2002) berpendapat bahwa pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada sistem konvensional hanya berfokus pada aspek material dan moral. Ia menambahkan bahwa seharusnya aspek spiritual juga dijadikan sebagai fokus utama dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan karena para pembuat keputusan Muslim memiliki ekspektasi agar perusahaan mengungkapkan informasi-informasi terbaru secara sukarela guna membantu dalam pemenuhan kebutuhan spiritual mereka. Oleh karena itu, ia memandang bahwa perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip Islam.

Kerangka tersebut tidak hanya berguna bagi para pembuat keputusan Muslim, tetapi juga berguna bagi perusahaan Islam dalam memenuhi pertanggungjawabannya terhadap Allah Subhanaahu wa Ta'ala dan masyarakat. Kerangka ini dikenal dengan sebutan *Islamic Social Reporting (ISR)*. *Islamic Social Reporting (ISR)* menggunakan prinsip syariah sebagai landasan dasarnya. Prinsip syariah dalam ISR menghasilkan aspek-aspek material, moral, dan spiritual yang menjadi fokus utama dari pelaporan sosial perusahaan. *Islamic Social Reporting (ISR)* merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang tidak hanya berupa keinginan besar dari seluruh masyarakat terhadap peranan perusahaan dalam ekonomi melainkan berkaitan dengan perspektif spiritual (Haniffa,2002). ISR lebih menekankan terhadap keadilan sosial dalam pelaporannya selain pelaporan terhadap lingkungan, kepentingan minoritas dan

karyawan. Hal ini menyangkut masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dalam praktik perdagangan yang tidak merata (Sulaiman, 2005) seperti pendistribusian pendapatan (dikenal sebagai *zakat*). Faktor penting yang menjadi dasar syariah dalam pembentukan *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah Tauhid (Tuhan Yang Esa) dan tidak menyekutukan-Nya, menyerahkan segala urusan kepada Allah dan tunduk terhadap segala perintah-Nya, meyakini bahwa kepunyaan Allah-lah Kerajaan langit dan bumi (Qur'an 57:5), dan kemudian kepada-Nya lah kamu dikembalikan (Qur'an 2:28). Hal tersebut mengarahkan pandangan seorang Muslim untuk mau menerima segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam berdasarkan dua sumber utama yaitu Qur'an dan Hadist. Syariah menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim dan sangat berpengaruh dalam kemakmuran seluruh umat (masyarakat).

Penelitian ini menggunakan kerangka *Islamic Social Reporting* dengan rujukan utama Haniffa (2002) yang dimodifikasi dengan item-item yang terdapat pada penelitian Othman *et.al.* (2009). Berikut kelima tema pengungkapan dalam *Islamic Social Reporting* yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pendanaan dan Investasi

- a). *Riba (interest-free)*

riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*Al-Ziyadah*), berkembang (*An-Nuwuw*), meningkat (*Al-Irtifa'*), dan membesar (*Al-'uluw*). Antonio, 1999 (dalam Wasilah dan Nurhayati, 2011) memaparkan mengenai masalah riba sebagai setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti (*'iwad*) yang dibenarkan

syariah. Hal yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil proyek dimana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbang berupa ikhtiar/usaha, risiko dan biaya. Larangan riba dalam Al-Quran QS. Al-Baqarah 278-280 :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak pula dizalimi (dirugikan). Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

b). *Gharar* (ketidakpastian)

terjadi ketika terdapat *incomplete information* antara kedua belah pihak yang bertransaksi dalam hal kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad. Salah satu contoh dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah transaksi *lease and purchase* (sewa-beli) karena adanya ketidakpastian dalam akad yang diikrarkan antara kedua pihak.

c). *Zakat*

zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Muslim atas harta benda yang dimiliki ketika telah mencapai nisab. Zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan, dan shadaqah. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat,

cara penghitungannya, dan siapa saja yang boleh menerima harta zakat sesuai apa yang telah diatur oleh Allah Subhanaahu wa Ta'ala.

d).Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih

Penangguhan atau penghapusan utang harus dilakukan dengan adanya penyeleidikan terlebih dahulu kepada pihak debitur terkait ketidakmampuannya dalam pembayaran piutang. Penangguhan atau penghapusan utang merupakan suatu bentuk sikap tolong-menolong yang dianjurkan didalam Islam sesuai dengan firman Allah Subhanaahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280 berikut.

Dan jika (orang berutang) dalam kesulitan, maka berilah tangguh hingga dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

e). Current Value Balance Sheet

Nilai kini dalam neraca akan dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan berapa jumlah zakat yang dikeluarkan. Nilai kini dapat diperoleh dari estimasi nilai rata-rata transaksi yang terjadi atau transaksi yang akan terjadi apabila aset tersebut diperjualbelikan oleh perusahaan. Dalam ekonomi Islam, *current value balance sheet* sudah seharusnya dimasukkan sebagai bagian dari persyaratan pelaporan operasi perusahaan (Sulaiman, 2003). Namun, PSAK Indonesia masih memberlakukan nilai historis atas nilai-nilai akun pada neraca. Salah satu aspek yang masih mengandung nilai historis adalah pengukuran setelah pengakuan aset tidak berwujud. Dalam PSAK No 19 (revisi 2000) disebutkan bahwa entitas

hanya dapat menggunakan model harga perolehan dalam mengukur aset tidak berwujud. Meskipun, PSAK No. 19 (revisi 2009) yang mulai berlaku efektif tahun buku 1 Januari 2011 sudah mengarahkan pada konsep *current value* menyatakan bahwa tiap entitas diberikan kebebasan untuk menggunakan model harga perolehan atau model revaluasi dalam mengukur aset tidak berwujud. Oleh karena itu, klasifikasi *current value balance sheet* tidak relevan untuk dijadikan kriteria dalam pengungkapan penelitian ini.

f). Value Added Statement

Menurut Staden (2000) *value added* adalah nilai yang tercipta dari hasil aktivitas perusahaan dan karyawan-karyawannya. Sedangkan *value added statement* merupakan pernyataan yang melaporkan perhitungan nilai tambah beserta pemanfaatannya oleh para pemangku kepentingan perusahaan. Istilah *value added statement* pada dewasa ini diartikan sebagai laporan pertambahan nilai. *Value Added Statement* lebih berkembang di negara-negara maju dibandingkan dengan negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga, dalam penelitian ini istilah *value added statement* lebih merujuk pada pernyataan nilai tambah dalam laporan tahunan perusahaan.

2. Produk dan Jasa

a). Produk yang ramah lingkungan (*green product*)

Setiap perusahaan di seluruh dunia diharapkan menghasilkan produk ataupun jasa yang ramah lingkungan sebagai suatu bentuk partisipasi

dalam menjaga dan memelihara lingkungan yang kian mengalami kerusakan.

b). Status kehalalan produk

Pentingnya status kehalalan suatu produk merupakan suatu kewajiban yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya kepada seluruh konsumen Muslim yang notabennya masyarakat Indonesia sebagian besar adalah pemeluk agama Islam. Status kehalalan suatu produk diketahui setelah mendapatkan sertifikat kehalalan produk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

c). Kualitas dan keamanan suatu produk

Setelah produk dinyatakan halal, hal lain yang juga penting untuk perusahaan dalam mengungkapkan produknya adalah mengenai kualitas dan keamanan produk. Produk yang berkualitas dan aman akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap suatu perusahaan. Kualitas dan keamanan suatu produk perusahaan dinyatakan dengan adanya ISO 9000:2000 yang merupakan sertifikat manajemen mutu.

d).Keluhan konsumen/indikator yang tidak terpenuhi dalam peraturan dan kode sukarela (jika ada)

Item pengungkapan selanjutnya adalah mengenai keluhan konsumen atau pelayanan pelanggan. Suatu perusahaan diharapkan tidak hanya berfokus pada produk yang dihasilkan (*product-oriented*) melainkan memberikan pelayanan terhadap konsumen yang memuaskan (*consumer-oriented*)

dengan menyediakan pusat layanan keluhan konsumen setelah proses jual beli.

3. Karyawan

Haniffa (2002) dan Othman dan Thani (2010) memaparkan bahwa masyarakat Islam ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan telah diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan, seperti upah, karakteristik pekerjaan, jam kerja per hari, libur tahunan, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan terkait waktu dan tempat ibadah, pendidikan dan pelatihan, kesetaraan hak, dan lingkungan kerja. Berdasarkan penjelasan di atas, item pengungkapan pada tema karyawan yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada lampiran 1.

4. Masyarakat

Item-item pengungkapan dalam tema masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sodaqoh*/donasi, *wakaf*, *qard Hassan*, sukarelawan dari pihak karyawan, pemberian beasiswa, pemberdayaan kerja bagi siswa yang lulus sekolah/kuliah berupa magang atau praktik kerja lapangan, pengembangan dalam kepemudaan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas bawah, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal/bantuan/kegiatan sosial lain, dan mensponsori berbagai macam kegiatan seperti kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama. Kesebelas item tersebut dipaparkan dalam lampiran 1. Menurut Haniffa (2002) menerangkan bahwa konsep dasar yang mendasari tema ini adalah *ummah*, amanah, dan *adl*. Konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi dan

meringankan beban orang lain dengan hal-hal yang telah disebutkan pada item-item pengungkapan di atas. Perusahaan memberikan bantuan dan kontribusi kepada masyarakat dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat seperti membantu memberantas buta aksara, memberikan beasiswa, dan lain-lain (Maali *et al.*, 2006 dan Othman dan Thani, 2010).

5. Lingkungan

Haniffa (2002) menegaskan bahwa penting bagi seluruh makhluk hidup untuk melindungi lingkungan sekitarnya. Konsep yang mendasari tema lingkungan dalam penelitian ini adalah *mizan*, *i'tidal*, *khilafah*, dan *akhirah*. Konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Oleh karena itu, informasi-informasi yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya dan program-program yang digunakan untuk melindungi lingkungan harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan (Othman dan Thani, 2010). Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanaahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 berikut:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia, supaya Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa item pengungkapan yang berhubungan dengan tema lingkungan ini antara lain: konservasi lingkungan, perlindungan terhadap margasatwa, kegiatan mengurangi efek pemanasan

global dengan meminimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih, dan lain-lain, pendidikan mengenai lingkungan, pemanfaatan limbah sekitar perusahaan yang diolah kembali menjadi suatu produk baru, pernyataan verifikasi independen atau audit lingkungan, dan sistem manajemen lingkungan. Ketujuh item pengungkapan tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.

2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

2.3.1 Ukuran Perusahaan

Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak (Siregar dan Utama, 2005). Pengungkapan sosial yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis bagi perusahaan (Hasibuan, 2001). Dengan mengungkapkan kepedulian pada lingkungan melalui pelaporan keuangan, maka perusahaan dalam jangka waktu panjang bisa terhindar dari biaya yang sangat besar akibat dari tuntutan masyarakat. Selain itu, perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki *public demand* terhadap informasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang berukuran lebih kecil. Banyaknya pemegang saham menandakan jika perusahaan tersebut memerlukan lebih banyak pengungkapan yang dikarenakan adanya tuntutan dari para pemegang saham dan para analisis pasar modal (Gunawan, 2001). Cowen *et al* (1987) dalam Sembiring (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih

besar mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan dalam laporan tahunan, yang merupakan media untuk menyebarkan informasi tentang tanggung jawab sosial keuangan perusahaan. Ayu (2010) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak hanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela, melainkan juga terhadap tingkat pengungkapan wajib.

Adanya dugaan bahwa perusahaan yang kecil akan mengungkapkan lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan perusahaan besar, menurut Buzby (dalam Hasibuan, 2001). Hal ini karena perusahaan ketiadaan sumber daya dan dana yang cukup besar dalam laporan tahunan. Seorang manajemen khawatir apabila dengan adanya pengungkapan yang lebih banyak akan membahayakan posisi perusahaan terhadap kompetitor lain. Ketersediaan sumber daya dan dana membuat perusahaan merasa perlu membiayai penyediaan informasi untuk pertanggungjawaban sosialnya.

Penelitian Cooke (1992), Owusu-Ansah (1998), Ho dan Wong (2001), Haniffa dan Cooke (2005) telah membuktikan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan *proxy* total aset memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib ataupun sukarela. Namun, ada pula penelitian yang mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib dan sukarela. Penelitian tersebut dihasilkan oleh Akhtarudin (2005) dan Dahawy (2009). Hal itu dikarenakan perusahaan yang lebih besar adalah perusahaan yang memiliki sumber daya lebih banyak daripada perusahaan yang lebih kecil dan perusahaan yang lebih besar

memiliki pembiayaan, fasilitas, dan sumber daya manusia yang lebih banyak untuk dapat melakukan pengungkapan yang lebih sesuai dengan prinsip Islam (Othman *et al.*, 2009).

2.3.2 Profitabilitas

Pengungkapan mengenai pertanggungjawaban sosial perusahaan mencerminkan suatu pendekatan perusahaan dalam melakukan adaptasi dengan lingkungan yang dinamis dan bersifat multidimensi. Hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan profitabilitas perusahaan telah diyakini mencerminkan pandangan bahwa reaksi sosial memerlukan gaya manajerial yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk membuat suatu perusahaan memperoleh keuntungan (Bowman dan Haire, 1976 dalam Sembiring, 2003).

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan cerminan suatu pendekatan manajemen dalam menghadapi lingkungan yang dinamis dan *multidimensional* serta kemampuan untuk mempertemukan tekanan sosial dengan reaksi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, ketrampilan manajemen perlu dipertimbangkan untuk *survive* dalam lingkungan perusahaan masa kini (Cowen et al. 1987 dalam Hasibuan, 2001). Heinze (1976) dalam Gray et al. (1995) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial.

Dari perspektif Islam, perusahaan harus bersedia untuk memberikan pengungkapan penuh tanpa melihat apakah perusahaan memberikan keuntungan atau tidak (Haniffa, 2002). Namun, Janggu (2004) berpendapat bahwa perusahaan dengan profiatabilitas yang lebih tinggi kemungkinan akan mengungkapkan informasi yang lebih dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas yang kurang.

. 2.3.3 Tipe Industri

Profil perusahaan telah diidentifikasi sebagai faktor potensial yang mempengaruhi praktek pengungkapan sosial perusahaan. Berikut beberapa penelitian yang telah membuktikan secara empiris bahwa tipe industri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan perusahaan kepada masyarakat. Cooke (dalam Gunawan, 2002) menyatakan bahwa luas pengungkapan dalam laporan tahunan mungkin tidak sama untuk semua sektor ekonomi. Menurut Verreccia (dalam Surtiyo, 2000) biaya *proprietary* (politik dan *competitive disadvantage*) berbeda antar industri. Disamping itu, menurut Meek, Robert dan Gray (dalam Surtiyo, 2000) relevansi item pengungkapan tertentu berbeda-beda antar industri. Dalam penelitian Surtiyo (2000) menggunakan variabel industri yang dikelompokkan ke dalam perusahaan bank dan non bank, tetapi hasilnya tidak signifikan.

Dalam penelitian Rahayu (2006) variabel industri yang dikelompokkan dalam industri jasa dan non jasa (riil). Perusahaan jasa mempunyai karakteristik yang unik. Karakteristik ini menjadikan industri jasa mempunyai kompleksitas yang berbeda dengan industri pada umumnya. Secara otomatis, luas pengungkapan informasi yang disajikan pun berbeda dengan informasi pada

perusahaan non jasa. Karena bergerak dalam bidang jasa, maka manajemen akan mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan yang dipublikasikan, tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2006) hasilnya tidak signifikan. Gunawan (2002) mengatakan bahwa perusahaan jasa mempunyai kualitas pengungkapan sukarela yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan non jasa.

Dalam penelitian lainnya, para peneliti mengelompokkan perusahaan-perusahaan ke dalam jenis industri tertentu. Pengelompokkan jenis industri dilakukan sesuai dengan tujuan masing-masing penelitian. Ho dan Wong (2001) mengelompokkan menjadi industri konglomerasi, perbankan dan keuangan, manufaktur, dan lain-lain, Akhtaruddin (2005) mengelompokkan menjadi perusahaan tradisional dan modern, Haniffa dan Cooke (2005) mengelompokkan menjadi sektor perbankan, asuransi industrial, dan jasa.

Penelitian ini mengelompokkan tipe industri menjadi perusahaan yang masuk ke dalam industri manufaktur dan non-manufaktur yang serupa dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Cook (1989), Cooke (1992), Hossain *et al.* (2006), dan Omar dan Simon (2011) yang membuktikan bahwa perusahaan pada industri manufaktur melakukan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan pada industri non manufaktur.

2.3.4 Jenis Bank

Dilarangnya praktik riba dalam bank syariah diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perusahaan yang meliputi pertanggungjawaban sosial

perusahaan, sebagai pembanding antar lembaga keuangan lainnya. Inti adanya bank yang berlandaskan Islam ini adalah resiko yang akan diterima sama besar oleh setiap nasabah maupun bank itu sendiri, instrumen keuangan yang bebas bunga dan kontrak pembagian hasil. Bank syariah bersifat akuntabilitas terhadap beberapa *stakeholders* yaitu investor, kreditur, pemilik dan pemegang saham, manajemen, panitia amil zakat, pemerintah, masyarakat, karyawan, konsumen dan para pembayar zakat. Adanya pengaturan yang kuat dan pengungkapan yang meningkat di dalam bank syariah dapat mempertinggi kepercayaan *stakeholder*.

Salah satu perbedaan yang signifikan antara struktur tata kelola lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah dan Unit Peninjau Syariah (Grais dan Pellegrini, 2006c). Dewan Pengawas Syariah berusaha untuk meningkatkan tata kelola perusahaan pada bank syariah. Dewan Pengawas Syariah harus terdiri dari para sarjana hukum Islam. Konsep Islam mengenai tata kelola perusahaan sejalan dengan konsep pertanggungjawaban sosial yang dikemukakan oleh para sarjana (Bhatti dan Bhatti, 2009). Meningkatkan kesejahteraan sosial dan akuntabilitas merupakan tujuan dari lembaga keuangan syariah yang berdasarkan prinsip Islam (Farook dan Lanis, 2005). Menurut konsep Islam, sasaran terhadap moral masyarakat harus diintegrasikan ke dalam strategi dan tujuan bisnis lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, bagi lembaga keuangan syariah, pengungkapan pertanggungjawaban sosial adalah tujuan utama mereka dibandingkan dengan aktifitas bisnisnya (Hassan dan Abdul Latif, 2009).

Berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia menjadikan beberapa perusahaan maupun tiap individu mempercayakan dana keuangannya untuk disimpan dan dikelola dalam lembaga keuangan syariah yang telah dipilihnya. Berbagai syarat dan tujuan yang dimiliki oleh bank syariah yang sesuai dengan prinsip Islam menjadikan faktor yang selalu diperhitungkan bagi perusahaan maupun individu yang akan menggunakan pelayanan lembaga keuangan syariah. Bank syariah dirasa memiliki tujuan yang lebih besar terhadap masyarakat dibandingkan dengan bank konvensional yang dirasa hanya menguntungkan dari segi finansialnya saja kepada para nasabahnya.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menganalisis pengaruh jenis industri terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Reporting-CSR*), pengaruh kinerja keuangan dan berbagai karakteristik perusahaan yang akan berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Semua penelitian ini berhubungan dengan CSR. Dalam beberapa dekade ini, memang isu CSR memang sangat berkembang. Perkembangan isu tersebut tidak hanya berdampak positif terhadap sistem ekonomi konvensional, tapi juga bagi sistem ekonomi Islam. Hal itu ditandai dengan berkembangnya penelitian yang menganalisis tentang pengungkapan CSR dari perspektif Islam yang dikenal dengan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Namun, kebanyakan penelitian mengenai ISR masih sangat terbatas karena banyak dilakukan di negara Malaysia dengan perusahaan-perusahaan Malaysia sebagai objek penelitiannya. Sehingga, ada beberapa aspek spesifik yang melekat pada kondisi Malaysia yang sulit diterapkan di negara lain.

Pada penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh beberapa faktor terhadap tingkat ISR pada perusahaan-perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah 2009-2011. Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu analisis mengenai hasil metode *content analysis* indeks ISR dan analisis mengenai pengaruh beberapa faktor terhadap tingkat ISR. Penelitian mengenai pembahasan hasil metode *content analysis* indeks ISR pernah dilakukan oleh Maali *et al.* (2006) terhadap bank syariah di enam negara, Othman dan Thani (2010) terhadap perusahaan-perusahaan di Bursa Malaysia, Fitria dan Hartanti (2010) terhadap bank syariah di Indonesia, dan Raditya (2012) terhadap perusahaan-perusahaan yang terdapat pada DES tahun 2009-2010. Beberapa hasil pengujian dari penelitian terdahulu dapat dilihat dari Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

No.	Nama Peneliti	Judul/Topik Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Bassam Maaali, Peter Caason dan Christopher Napier (2006)	Social Reporting by Islamic Banks	Sampel: bank-bank syariah di enam negara Social Reporting Disclosure Index sebagai literatur dalam <i>content analysis</i>	Isu-isu sosial yang berkembang tidak mempengaruhi pengungkapan pelaporan bank syariah. Bank yang mengalokasikan dananya untuk zakat memiliki tingkat pengungkapan sosial yang lebih besar

				dibandingkan mereka yang tidak mengalokasikan.
2.	Rohana Othman, Azlan Md Thani Erlane Ghani (2009)	Determinants of Islamic Social Reporting Among Top <i>Shariah</i> -Approved Companies in Bursa Malaysia	Independen: <i>Size</i> , Profitabilitas, Komposisi Dewan dan Tipe Industri Dependen ; Islamic Social Reporting (ISR)	Tipe industri tidak berpengaruh terhadap tingkat ISR.
3.	Soraya Fitria dan Dwi Hartanti (2010)	Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan <i>Global Reporting Initiative</i> Indeks dan <i>Islamic Social Reporting</i> Indeks	Sampel: bank syariah dan bank konvensional Dependen: Indeks ISR dan Indeks GRI	Bank konvensional memiliki pengungkapan yang lebih baik dibandingkan bank syariah, pengungkapan berdasarkan indeks GRI berskor yang lebih baik dibandingkan indeks ISR, dan Perkembangan indeks ISR di Indonesia masih lambat dibandingkan

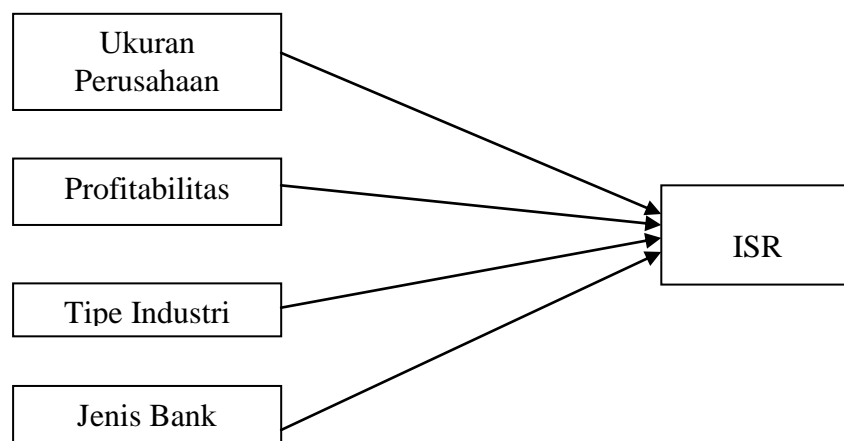
				dengan perkembangan indeks ISR di negara-negara Islam lain.
4.	Amalia Nurul Raditya (2012)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR) pada Perusahaan yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES)	Independen: Penerbitan sukuk, ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis industri, dan umur perusahaan. Dependen: Islamic Social Reporting	Penerbitan sukuk, jenis industri dan umur perusahaan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR. Sedangkan, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan ISR.

2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.3 mengilustrasikan kerangka yang akan mendukung dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran ini akan menjelaskan empat faktor perusahaan yang berpengaruh untuk mengungkapkan ISR. Keempat faktor tersebut antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis industri dan jenis bank yang digunakan perusahaan.

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran



2.6 Hipotesis

Haniffa (2002) mencatat akan pentingnya perusahaan mengungkapkan *Islamic Social Reporting* (ISR) karena dapat menunjukkan akuntabilitas perusahaan kepada masyarakat, melayani mekanisme dalam meningkatkan transparansi segala aktivitas serta menyesuainya dengan kebutuhan spiritual para pembuat keputusan muslim. Namun, apa yang sebenarnya mempengaruhi

perusahaan untuk mengungkapkan ISR belum ditentukan secara empiris. Meskipun penelitian pada pelaporan sosial perusahaan sudah banyak diteliti, penelitian ini mengabaikan akan pentingnya ISR dan oleh karena itu ISR menjadi variabel dependen.

2.6.1 Ukuran Perusahaan dan *Islamic Social Reporting*

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa cara. Menurut Hossain *et al* (2006), ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan jumlah karyawan, nilai total aset, dan volume penjualan. Namun, ketiga *proxy* tersebut sangat berkorelasi tinggi antara satu dengan yang lain. Sedangkan, Cooke (1992) memaparkan bahwa ukuran perusahaan dapat diukur dengan modal saham, *turnover*, jumlah pemegang saham, total aset, aset lancar, aset tetap, *shareholder's fund*, dan *bank borrowing*.

Dan secara lebih spesifik, penelitian yang terkait antara ukuran perusahaan dan ISR pernah dilakukan oleh Othman *et al.* (2009) dan Raditya (2012). Hasil penelitian keduanya selaras dengan kebanyakan penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, yakni ukuran perusahaan secara positif signifikan mempengaruhi tingkat ISR. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Othman *et al* (2009), penelitian ini menduga bahwa perusahaan yang lebih besar akan cenderung melakukan pengungkapan ISR secara lebih luas.

H₁ : Ada hubungan positif antara ukuran perusahaan dan tingkat ISR

2.6.2 Profitabilitas dan *Islamic Social Reporting*

Perusahaan yang berada pada posisi menguntungkan akan cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunannya.

Menurut Watts dan Zimmerman (1986), perusahaan dengan profit yang lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan intervensi kebijakan. Oleh karena itu, perusahaan tersebut akan terdorong untuk mengungkapkan informasi yang lebih rinci dalam laporan tahunan mereka dalam rangka mengurangi biaya politik dan menunjukkan kinerja keuangan kepada publik. Profitabilitas dapat diukur dengan beberapa cara, antara lain ROA, ROE, ROCE, laba per saham, deviden dalam suatu periode, margin keuntungan, tingkat penegmbalian, dan lain-lain. Penelitian sebelumnya Othman *et al.* (2009) dan Raditya (2012) membuktikan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR. Oleh karena itu, penelitian ini menduga bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi akan melakukan ISR secara lebih luas.

H₂ : Ada hubungan positif antara profitabilitas dan tingkat ISR

2.6.3 Tipe industri dan *Islamic Social Reporting*

Dalam penelitian ini, tipe industri dikelompokkan menjadi perusahaan yang masuk ke dalam industri manufaktur dan non manufaktur. Menurut Suwaidan (1997) dalam Omar dan Simon (2011), perusahaan manufaktur menghasilkan polusi yang lebih banyak daripada perusahaan non manufaktur sehingga informasi tambahan harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur.

Penelitian yang berkaitan dengan ISR telah dilakukan oleh Othman *et al* (2009) dan Raditya (2012), dimana mereka mengungkapkan bahwa tipe industri tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat ISR. Berdasarkan analisis di atas,

penelitian ini memprediksi bahwa terdapat perbedaan tingkat ISR di antara perusahaan manufaktur dan non manufaktur.

H₃ : Ada hubungan positif antara tipe industri dan tingkat ISR

2.6.4 Jenis Bank dan *Islamic Social Reporting*

Sebuah penelitian yang didukung oleh penelitian sebelumnya dari Safieddine (2000) yang berpendapat bahwa pengungkapan praktik pertanggungjawaban sosial perusahaan yang memadai kepada masyarakat adalah penting untuk menjaga kepemilikan investor dan untuk mengurangi paham oportunistik manajer di lembaga keuangan Islam. Pertanyaan penelitian kami memeriksa adanya pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang luas di dalam laporan tahunan bank Islam yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Salah satu isu syariah, *zakat*, juga diperiksa. Pemeriksaan yang didukung oleh penelitian Maali (2006) yang menemukan bahwa lembaga keuangan Islam lebih banyak menyediakan *zakat* dalam pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Sehingga penelitian ini memprediksi bahwa perusahaan yang menggunakan bank syariah akan cenderung melakukan ISR secara luas.

H₄ : Ada hubungan positif antara jenis bank dan tingkat ISR

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini melibatkan empat variabel bebas (independen), satu variabel terikat (dependen). Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Tipe Industri dan Jenis Bank.

3.1.1 Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah variabel yang sering digunakan untuk menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan yang dibuat. Penelitian ini menggunakan *proxy* total aset yang diperoleh dari laporan posisi keuangan pada akhir periode dalam laporan tahunan perusahaan. Variabel ukuran perusahaan ini menggunakan satuan mata uang Rupiah dan diberi simbol SIZE.

2. Profitabilitas

Nilai profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Return On Equity*. ROE adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total ekuitas. Variabel profitabilitas ini menggunakan satuan mata uang Rupiah dan diberi simbol dengan PROFIT.

3. Tipe Industri

Tipe industri dalam penelitian ini merujuk pada pengklasifikasian industri menurut Daftar Efek Syariah dengan pengklasifikasi yang sesuai dengan Bursa Efek Indonesia meskipun tidak menggunakan sektor keuangan sebagai sampel perusahaan dalam penelitian ini. Tabel 3.1 di bawah ini merupakan klasifikasi tipe industri berdasarkan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tabel 3.1

A.	Sektor Utama
	1. Pertanian dan Perkebunan
	2. Pertambangan
B.	Sektor Kedua
	3. Industri Dasar dan Kimia
	4. Aneka Industri
	5. Industri Barang Konsumsi
C.	Sektor Ketiga
	6. Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan
	7. Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
	8. Keuangan
	9. Perdagangan, Jasa dan Investasi

Variabel tipe industri merupakan variabel *dummy* yang dikelompokkan ke dalam industri manufaktur dan non-manufaktur, dengan nilai 1 untuk perusahaan manufaktur dan nilai 0 untuk perusahaan non-manufaktur.. Variabel ini diberi simbol DINDS.

4. Jenis Bank

Pemilihan jenis bank dalam suatu perusahaan mempunyai faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan atau dalam penelitian ini adalah *Islamic Social Reporting (ISR)*. Penelitian ini mengidentifikasi adanya jenis bank sebagai variabel *dummy* dengan nilai 1 untuk jenis bank syariah dan 0 untuk bank konvensional. Variabel independen ini diberi simbol BANK.

3.1.2 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Islamic Social Reporting (ISR)*.

1. *Islamic Social Reporting (ISR)*

Islamic Social Reporting merupakan variabel dependen yang diukur dengan indeks ISR dari masing-masing perusahaan setiap tahun. Nilai indeks tersebut diperoleh dengan metode *content analysis* pada laporan tahunan perusahaan. Metode *content analysis* merupakan teknik analisis berbentuk dokumen dan teks yang berupaya menguantifikasi isi menurut kategori (indeks) yang sudah ditetapkan, dengan cara sistematis dan dapat diulang-ulang. Indeks yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks ISR tanpa pembobotan. Adharani (2005) dalam Oktaviana (2009) memaparkan mengenai dua pertimbangan penggunaan teknik tanpa pembobotan dalam *scoring* indeks pengungkapan sukarela. Pertama, laporan tahunan disampaikan untuk tujuan umum sehingga informasi yang diberikan tidak dapat dilihat dari sudut kepentingan tertentu. Suatu informasi tertentu tidak dapat dianggap lebih penting daripada informasi lain karena kadar kepentingan tiap-tiap pihak berbeda. Suatu

informasi yang dianggap penting oleh satu pihak mungkin saja dianggap kurang penting bagi pihak lain ataupun sebaliknya. Kedua pembobotan dapat mengandung subjektifitas karena tergantung pada penilaian dan argumentasi masing-masing peneliti. Oleh karena itu, *scoring* indeks ISR dalam penelitian ini menggunakan metode *content analysis* tanpa pembobotan.

Indeks ISR dalam penelitian ini terdiri dari 38 item pengungkapan yang tersusun dalam lima tema sesuai dengan penelitian Haniffa (2002) dan dimodifikasi dengan item-item pengungkapan pada penelitian Othman *et al.* (2009). Masing-masing item pengungkapan memiliki nilai 1 atau 0. Nilai 1 akan diberikan apabila item pada ISR terdapat dalam data perusahaan dan nilai 0 akan diberikan apabila sebaliknya. Nilai-nilai tersebut kemudian dijumlahkan baik menurut masing-masing tema maupun secara keseluruhan. Sehingga nilai terbesar adalah 38 dan nilai terkecil adalah 0 untuk setiap perusahaan dalam setiap tahun. Variabel dependen ini diberi simbol ISR. Pengklasifikasian indeks ISR yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada lampiran 1. Berikut rumus untuk menghitung besarnya *disclosure level* setelah *scoring* pada indeks ISR selesai dilakukan.

$$\text{Disclosure Level} = \frac{\text{Jumlah skor disclosure yang dipenuhi}}{\text{Jumlah skor maksimum}}$$

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah akhir Mei dan November dalam kurun waktu tahun 2009-2011 sebanyak 117 perusahaan. Tahap selanjutnya adalah pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sampel, antara lain: (1). Perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah, dan (2). Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan perusahaan selama tiga tahun. Berikut tahap-tahap pengambilan sampel pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Proses Pengambilan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah dalam enam periode selama kurun waktu tahun 2009-2011	117
2.	Perusahaan yang menggunakan mata uang selain Rupiah	(8)
3.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan perusahaan selama tiga tahun, 2009-2011	(5)
4.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan perusahaan selama dua tahun yaitu 2009 dan 2011 serta 2010 dan 2011	(3)
5.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan perusahaan pada tahun tertentu.	(26)
Total Perusahaan		75

Sumber : Hasil olah penulis

Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini setiap tahunnya adalah 75 perusahaan (Lampiran 2).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter, yaitu laporan tahunan (*annual report*) selama tahun 2009-2011 dari perusahaan - perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan tahunan tahun 2009-2011. Penggunaan data sekunder pada penelitian ini didasarkan pada alasan :

1. Data mudah diperoleh, hemat waktu dan biaya.
2. Data laporan tahunan telah digunakan dalam berbagai penelitian, baik penelitian di dalam negeri maupun luar negeri.
3. Data laporan tahunan yang terdapat di BEI memiliki reliabilitas yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya karena telah diaudit oleh auditor independen.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumentasi, dengan menggunakan nama-nama perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah sebanyak enam periode atau selama kurun waktu 2009-2011. Daftar Efek Syariah diperoleh dari situs Bapepam-LK (www.bapepam.go.id). Tahap selanjutnya, pengambilan data perusahaan berupa

annual report pada situs BEI (www.idx.go.id). Data-data perusahaan tersebut selanjutnya digunakan untuk mengisi indeks *Islamic Social Reporting*.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel yang ada di dalam penelitian ini. Pengukuran yang digunakan mencakup nilai rata-rata (*mean*), minimum, dan maksimum yang disajikan dalam tabel numerik yang dihasilkan dari pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 16. Pada statistik deskriptif ini juga digunakan analisis tabulasi silang (*crosstab*) guna mengidentifikasi dan mengetahui hubungan korelasi antara dua variabel data berskala nominal dan kategori yang disajikan dalam bentuk baris dan kolom.

3.5.2 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada proses uji normalitas dilakukan dengan uji statistik dan analisis grafik, yaitu Uji Kolmogorov-Smirnov dan grafik histogram.

1. Uji Kolmogorov-Smirnov

Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan pengujian normalitas dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Apabila nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya perbedaan yang signifikan dan jika nilai signifikansi di

bawah 0,05 maka terdapat adanya perbedaan yang signifikan atau hasil tidak normal sehingga perlu dilakukan uji grafik histogram untuk mengetahui kemencengan grafik (ke kanan atau kiri).

2. Grafik Histogram

Grafik histogram membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Adanya uji ini dapat diketahui apakah data berdistribusi secara normal atau tidak berdasarkan kemencengan grafik, baik ke kiri ataupun ke kanan. Selain itu, grafik histogram dapat digunakan untuk menentukan bentuk transformasi data yang akan digunakan untuk menormalkan data yang tidak berdistribusi secara normal.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji hipotesis penelitian ini dengan menggunakan regresi linier berganda. Sebagai prasyarat regresi linier berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya bersifat efisien (Ghozali, 2009). Pengujian asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.

1. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi jika ada hubungan linier yang sempurna atau hampir sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2005).

Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai *tolerance* serta *variance inflation factor* (VIF). Multikolinearitas terjadi apabila nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Dan nilai VIF lebih besar dari 10, jika VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model adalah objektif dan dapat dipercaya.

2. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya), uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode Run Test. Metode ini digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Apabila nilai signifikansinya di bawah 0,05 berarti terdapat gejala autokorelasi.

3. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah terjadinya varians yang tidak sama untuk variabel independen yang berbeda. Heterokedastisitas dapat terdeteksi dengan melihat plot antara nilai taksiran dengan residual dan dengan melakukan uji statistik yaitu Uji Park. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas pada grafik *scatterplot*. dapat dilakukan dengan :

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk satu pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka akan terjadi masalah heterokedastisitas.
2. Jika tidak ada pola jelas seperti titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu-sumbu, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Untuk lebih menjamin keakuratan hasil maka dilakukan uji statistik dengan menggunakan uji Park. Uji Park mengemukakan untuk meregresikan nilai logaritma kuadrat residual ($\text{Ln}U^2_i$) sebagai variabel dependen terhadap variabel dependen. Jika dari hasil uji Park didapat bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai logaritma kuadrat residual ($\text{Ln}U^2_i$) dan probabilitas signifikansinya di atas kepercayaan 5% maka dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi tidak mengandung gejala Heterokedastisitas.

3.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda (Multiple Linear Regression) dengan alasan bahwa variabel independennya lebih dari satu. Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara ISR dengan variabel-variabel independennya. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{ISR} = \alpha + \beta_1\text{SIZE} + \beta_2\text{PROFIT} + \beta_3\text{IND} + \beta_4\text{BANK} + \varepsilon$$

Keterangan:

ISR	: Tingkat <i>Islamic Social Reporting</i>
α	: Regresi yang diterima
β_i	: Parameter yang diestimasi
SIZE	: Ukuran Perusahaan, Total Aset (Ln)
PROFIT	: Profitabilitas, ROE
IND	: Tipe industri, kategori 8 tipe industri
BANK	: Jenis Bank
ε	: <i>Error term</i>
I	: 1, ..., 4. ... (4.1)

Kemudian untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel independen dengan tingkat ISR maka dilakukan pengujian-pengujian hipotesis penelitian terhadap variabel-variabel dengan pengujian di bawah ini.

3.6.1 Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (goodness of fit) yang dinotasikan dengan R^2 merupakan ikhtisar yang menyatakan bahwa seberapa baik garis regresi sampel mencocokkan data. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur proporsi variasi dalam variabel tidak bebas yang dijelaskan oleh regresi. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1, bila $R^2 = 0$ berarti tidak ada hubungan yang sempurna. Sedangkan apabila nilai $R^2 = 1$ maka ada hubungan antara variasi Y dan X atau variasi dari Y dapat diterangkan oleh X secara keseluruhan.

3.6.2 Uji F (Uji Simultan)

Menurut Ghazali (2005) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh

secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini berarti bahwa secara simultan keempat variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti secara simultan keempat variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.3 Uji-t (Uji Signifikan Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen secara individu (partial) dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5$ persen). Penolakan dan penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti secara parsial variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri, dan jenis bank berpengaruh terhadap tingkat ISR pada laporan tahunan.

2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti secara parsial variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri, dan jenis bank berpengaruh terhadap tingkat ISR pada laporan tahunan.